



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAMBANG SIGIT WIDODO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 710392

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.587.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/88 m² di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/60 m² di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/21 m² di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 344.000.000
4. Tanah Seluas 2195 m² di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 668.000.000
5. Tanah Seluas 5681 m² di MOJOKERTO, WARISAN Rp. 590.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/46 m² di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 807.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, V-16 SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT PAJERO SPORT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 598.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	205.953.730
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.654.853.730
III. HUTANG	Rp.	831.146.002
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.823.707.728

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.